GEREJA DI JALAN KEADILAN

Fungsi Sosial Gereja Menghadapi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Komunikasi di Bibir Pasifik

Ricardo F. Nanuru

ricardonanuru632@gmail.com

(Tulisan ini sudah diterbitkan bersama beberapa tulisan penulis lain pada buku dengan judul: Perdamaian dan Keadilan Dalam Konteks Indonesia yang Multikultural dan Beragam Tradisi Iman, terbitan BPK Gunung Mulia bekerjasama dengan Mission 21)

Abstraksi

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat berbagai persoalan yang terjadi di kalangan gereja termasuk Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), maupun masyarakat secara umum. Persoalan itu antara lain menyangkut kemiskinan, lemahnya fungsi komunikasi gereja, globalisasi yang membuat masuknya modal asing disertai tekanan berbagai korporasi yang mengakibatkan eksploitasi diberbagai bidang, hal mana membutuhkan kemampuan gereja untuk menyikapinya. Gereja dengan demikian membutuhkan refleksi kritis kontekstual dalam kerangka memperkuat elemen-elemen bergereja agar mampu menjawab tantangan ke depan. Mengkaji ulang pemahaman gereja terhadap kemiskinan dan fungsi sosial komunikatif, khususnya di GMIH menjadi tantangan tersendiri untuk ditelusuri. Dua usulan dikemukakan demi pekerjaan kontekstualisasi berteologi ke depan di kalangan GMIH. Pertama, gereja (termasuk GMIH) dengan kekuatan sumberdaya manusia dan dana sudah sepatutnya mulai memberdayakan jemaat-jemaatnya lewat kegiatan-kegiatan di dunia bisnis demi menjawab tantangan persoalan kemiskinan. Kedua, GMIH sudah saatnya lebih intensif keluar dari ruang privat religiusnya, bergabung bersama entitas privat lainnya, berdiskursus secara rasional komunikatif demi menghadapi tekanan pasar dan negara dengan segala ketidakadilannya demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil termasuk di dalamnya jemaat-jemaat kristen yang mempercayakan hidup untuk dinaunginya. Dengan melakukan dua hal ini, GMIH telah keluar dari belenggu primordialnya dan berjalan di jalan pembaharuan, jalan keadilan.

I. Pendahuluan

Mengawali tulisan ini, perlu ditegaskan bahwa masalah kemiskinan dan dampak yang ditimbulkannya adalah juga merupakan pokok bahasan ilmu teologi atau ilmu agama, apapun agamanya, dan bukan hanya menjadi bagian dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Untuk itu sebagai para teolog dan pemerhati kemiskinan, meneliti dan membahas masalah kemiskinan adalah bagian dari tanggungjawab moral dan iman kepada masyarakat sekaligus kepada Tuhan yang memberikan hidup ini. Perlu ditegaskan pula bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan keadilan apapun bentuknya yang sering dibicarakan dalam diskusi-diskusi, baik diskusi jalanan sekelas warung kopi maupun diskusi di ruang-ruang mentereng sekelas Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Membicarakan kemiskinan

dengan demikian dapat dikaitkan dengan keadilan yang tidak didapatkan oleh mereka yang dikategorikan miskin, walaupun ada yang tidak menyadarinya.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakikatnya belum ada keberlanjutan (*sustainability*) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim.¹ Kemiskinan sebagai salah satu krisis kemanusiaan, terjadi bukan hanya karena masyarakatnya yang kurang giat berusaha untuk mensejahterakan diri, tetapi juga terjadi akibat struktur yang menindas. Maksudnya adalah, kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat diakibatkan karena mereka ditindas oleh sistem (ekonomi, politik-kekuasaan, dll.) yang membuat kehidupan atau usaha mereka tidak berkembang. Hal lain yang membuat kemiskinan tetap bertahan di Indonesia adalah soal kesadaran masyarakat tentang kemiskinan itu sendiri. Kesadaran bahwa miskin membuat orang terhina, bahwa miskin bukan merupakan takdir, bahwa nasib bisa diubah, hanya dimiliki oleh kaum elit semata. Untuk masyarakat Indonesia, akibat terlalu lama hidup dalam kemiskinan, masyarakat miskin seperti kehilangan perasaan diri sebagai orang miskin. Masyarakat baru merasa miskin bila membandingkan diri dengan kesejahteraan masyarakat di negeri maju, ketika diperhadapkan dengan bantuan langsung tunai (BLT) atau asuransi kesehatan bagi warga miskin (Askeskin). Kemiskinan selama bertahun-tahun tidak dirasakan sebagai masalah besar yang mendesak untuk diselesaikan, sehingga kemungkinan telah dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam masyarakat.

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan, baik yang dikarenakan ketidakberuntungan situasi (*deprivation trap*) atau bisa juga miskin akibat dimiskinkan atau yang kita kenal sebagai kemiskinan struktural, pada hakikatnya sudah dilakukan sejak lama. Deretan program pengentasan kemiskinan telah banyak diluncurkan oleh pemerintah, mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), dan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Kemudian juga diteruskan dengan bergulirnya Program Subsidi Langsung Tunai/Bantuan Langsung

¹ Marcus J. Pattinama, "Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru – Maluku dan Surade – Jawa Barat)," Makara, Sosial Humaniora 13, no. 1 (Juli 2009): 1, diakses 20 April, 2015, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/e98e701d3488e758e71344d4c5a109bd7770dbd0.pdf>

Tunai (SLT/BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terakhir, program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah berupa Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kesemua program tersebut memiliki satu tujuan utama yaitu berupaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam suatu rangkaian program pemberdayaan. Bila dicermati, terdapat beberapa kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini. *Pertama*, tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin. Hal ini terjadi karena program lebih bersifat dan berorientasi pada ‘belas kasihan’ sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai “dana bantuan cuma-cuma” dari pemerintah. *Kedua*, asumsi yang dibangun lebih menekankan bahwa warga miskin membutuhkan modal. Konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin. Muaranya adalah rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku warga miskin dan warga masyarakat lainnya dalam memahami akar kemiskinan. *Ketiga*, program pemberdayaan lebih dimaknai secara parsial, misalnya titik berat kegiatan program hanya mengintervensi pada satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau aspek fisik, belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu.²

Berdasarkan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan pendapat-pendapat mengenainya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum efektif, sehingga sampai saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada data-data masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk BPS Maluku Utara yang sampai tahun 2015 tidak mengalami penurunan signifikan.³ Ketidakberhasilan penurunan jumlah masyarakat miskin ini yang dilakukan pemerintah ini bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang diartikan sebagai kondisi ekonomi semata, padahal ada sisi lain selain faktor ekonomi, misalnya budaya dan pandangan hidup masyarakat, termasuk

² Ahmad Taufiq, dkk, “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak),” *POLITIKA*, 1 no. 1, (April 2010), 75-6, diakses 20 April 2015. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEWiHiMHAqdTPAhXCKY8KHetQB6YQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fpolitika%2Farticle%2Fdownload%2F156%2F102&usg=AFQjCNH7yswXXI-AOBzPTaEy8JG-ol9Q5g>

³ Data lengkap mengenai garis kemiskinan dan penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara 2011-2015, dan di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat di *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2016*, (Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara), 144-5. Diakses 10 Agustus 2016. <http://malut.bps.go.id/backend/pdf publikasi/Provinsi-Maluku-Utara-Dalam-Angka-2016.pdf>

didalamnya pandangan agama/kepercayaan terhadap kemiskinan. Pandangan teologis agama, diindikasikan dapat juga menyumbang bagi pandangan penganutnya terhadap kemiskinan.

Masyarakat Kristen di Maluku Utara khususnya yang berada di bawah naungan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), dapat dikatakan menyumbang angka kemiskinan yang cukup besar. Data riil mengenai hal ini memang tidak dapat dikemukakan karena belum diteliti secara detil tetapi berdasarkan penelitian penulis bersama salah satu rekan pendeta GMIH pada beberapa jemaat di Wilayah Pelayanan GMIH Morotai Selatan, terlihat jelas bahwa sebagian besar jemaat Kristen hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Anehnya, masyarakat Kristen ini tidak menyadari bahwa mereka termasuk golongan masyarakat miskin seperti ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman mereka tentang kemiskinan masih sangat minim dan butuh pencerahan. Pertanyaan pentingnya adalah, tugas dan tanggung jawab pencerahan itu harus diembankan di pundak siapa? Bukankah kekristenan sudah berakar cukup lama di negeri ini? Kawasan terluar, “bibir pasifik” yang harusnya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk gereja.

II. Sekilas Tentang Kemiskinan di Jemaat GMIH Sion Daeo (Morotai Selatan) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.⁴

A. Konsep dan Konteks Kemiskinan di Jemaat GMIH Sion Daeo Morotai Selatan

Menjadi miskin pastinya tidak diinginkan oleh setiap orang, termasuk jemaat GMIH Sion Daeo di Morotai Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 pada jemaat GMIH Sion Daeo Morotai Selatan, didapati bahwa jemaat pada umumnya tidak merasakan bahwa mereka berada atau masuk dalam kategori miskin menurut pemerintah. Alasan mereka adalah bahwa keluarga mereka masih memiliki cukup makanan; makan sehari 3 (tiga) kali; memiliki rumah untuk berteduh (tinggal); mereka tidak tinggal di kolong jembatan; mereka tidak mengemis di jalan-jalan seperti disaksikan di tayangan-tayangan televisi.

Walaupun konsep kemiskinan jemaat terkesan tidak berada di garis kemiskinan, namun berdasarkan hasil wawancara dan amatan terhadap kondisi jemaat di lokasi penelitian

⁴ Bagian ini diolah dari laporan hasil penelitian Hibah Bersaing DIKTI tahun 2015 yang dilakukan penulis bersama Pdt. Arkipus Djurubasa, M.Th (dosen di Fakultas Teologi Universitas Halmahera) yang berjudul: *Pemetaan dan Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan pada Jemaat-Jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) di Kabupaten Pulau Morotai*. Penelitian ini berlokasi di beberapa jemaat, namun yang diangkat sebagai bagian tulisan ini hanyalah hasil penelittian di Jemaat GMIH Sion Daeo.

ini, sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana. Jalan keluar mereka untuk menanggulangi persoalan makan sehari-hari adalah dengan hidup apa adanya, makan apa adanya, mengganti makanan pokok seperti beras dengan makanan hasil kebun lainnya seperti pisang, ubi kayu, dan sebagainya, serta terkadang berkunjung ke rumah keluarga yang lebih mampu di kota untuk meminjam uang maupun untuk kebutuhan lainnya. Jemaat biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga (biasanya hanya untuk anak-anak). Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal, dinding rumahnya sebagian besar terbuat dari tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang tidak diplester, sebagian besar lantai rumah terbuat dari tanah dan sebagian dari semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah (lantai kasar), atap terbuat dari daun pohon sagu (ada yang dari seng dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah), penerangan bangunan tempat tinggal dari listrik yang sebagian besarnya memiliki 1 meteran untuk 2 rumah atau lebih, luas lantai rumah kecil (kurang dari 8m²/orang). Kenyataan ini menandakan bahwa mereka tergolong sebagai masyarakat miskin.

Berdasarkan amatan peneliti, sumber air minum jemaat diambil dari sumber air tidak terlindung seperti sumur dan sungai. Sumur pada jemaat juga dipakai secara bersama antar beberapa keluarga yang tinggalnya berdekatan. Tempat buang air besar pada jemaat sebagian besar masih berupa jamban umum, bahkan ada yang bukan jamban atau langsung di pantai atau pinggiran sungai. Hal ini terlihat juga lewat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bagian Sosial (Tabel 4.8) tentang Sumber Air Minum dan Sanitasi Sebagian Besar Warga di Kecamatan Morotai Selatan, 2015 (BPS Kabupaten Pulau Morotai, 2015). Selain itu, bahan bakar utama pada jemaat di lokasi penelitian masih menggunakan kayu bakar (bnd. BPS Kabupaten Pulau Morotai (Sarana dan Prasarana Tabel 6.4), 2015). Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini kepada jemaat, jawaban yang diberikan adalah bahwa sumur yang dipakai digali secara bersama oleh keluarga-keluarga berdekatan yang kebetulan bersaudara, jadi wajar kalau dipakai bersama sebagai sesama saudara, sehingga tidak perlu dipersoalkan sebagai bagian dari persoalan kemiskinan. Mengenai tempat buang air besar di pantai atau di sekitar sungai, jemaat beranggapan bahwa hal itu masih wajar karena mereka tinggal di desa yang masih luas dan tidak mengganggu seperti halnya kalau hal itu dilakukan di kota. Selain itu, beberapa keluarga menganggap hal itu lebih cepat dan praktis ketimbang terkadang mengantri di jamban umum. Mengenai sumber energi bahan bakar utama dari kayu bakar,

dikemukakan bahwa hal itu selain untuk melakukan penghematan sekaligus memanfaatkan ketersediaan bahan baku di sekitar lokasi tempat tinggal mereka.

Tabungan atau simpanan uang di bank tidak dimiliki oleh jemaat. Dana yang dimiliki hanya bersumber dari jualan hasil kebun dan pekerjaan serabutan yang dilakukan (diversifikasi pekerjaan), seperti tenaga upahan untuk produksi kopra sejak naik pohon kelapa sampai pada proses pengasapan dan *packing*; melaut jika lautan di pesisir pasifik tidak bergelombang tinggi; dan sebagainya. Dana berupa uang tersebut habis untuk membiayai kehidupan sehari-hari seperti membeli beras, dan kebutuhan pokok lainnya, serta membiayai sekolah anak-anak. Hal ini juga yang melandasi konsep kemiskinan jemaat, yaitu pola pikir mereka yang merasa tidak berada dalam garis kemiskinan dikarenakan anak-anak dapat bersekolah walaupun hanya di tingkat dasar dan menengah. Kalaupun ada yang lulus dari perguruan tinggi, biasanya ada karena bantuan keluarga di kota atau karena bantuan pemerintah/swasta melalui beasiswa, dan hal tersebut sudah dianggap sebagai indikator mampu secara finansial atau tidak miskin.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

1) Faktor Internal

a) Pemahaman Teologis

Agama yang di dalamnya pemahaman iman teologis jemaat bertumbuh turut menyumbang bagi perilaku rumah tangga miskin. Ajaran atau teks-teks kitab suci yang diajarkan/dikhotbahkan dari mimbar-mimbar gereja turut mempengaruhi jemaat turun-temurun. Ada beberapa teks kitab suci yang muncul dalam wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Salah satu teks suci yang sering muncul dalam wawancara adalah Injil Matius 5:3 yang berbunyi: *“Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga”*. Secara tradisional, teks ini sering dipakai untuk “melegalkan” kemiskinan di kalangan jemaat kristiani. Maksudnya adalah untuk menghibur mereka yang miskin di dunia karena mereka akan kaya (selamat) di Surga. Selain itu teks ini jika ditelusuri secara akademis biasanya dipakai bangsa kolonial untuk menindas masyarakat pribumi secara struktural lewat agama yang dibawahnya ke Indonesia, agar tidak memberontak dalam kemiskinan mereka. Jemaat di lokasi penelitian, khususnya yang rata-rata telah berusia lanjut sangat teguh berpegang pada teks ini, sehingga tidak melihat kemiskinan sebagai situasi yang harus dilawan, malahan cenderung menjadi tradisi kehidupan mereka. Faktor pemahaman teologis ini juga

cenderung dikuatkan lewat tidak adanya program-program pemberdayaan ekonomi yang digalakkan oleh gereja secara melembaga.

Selain teks di atas, ada juga teks kitab suci dari Mazmur 72:4,12-13 yang berbunyi: *“Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukan pemeras-pemeras! Sebab ia akan melepaskan orang yang berteriak minta tolong..., ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin.”* Menurut mereka, walaupun mereka dikategorikan miskin, ditindas, namun Tuhan akan tetap membela dan tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Keberpihakan Tuhan bagi mereka selalu nyata dan kongkrit, dimana mereka tidak pernah kelaparan walau dalam perang/konflik sekalipun. Hal ini terkait erat dengan pemahaman jemaat di lokasi penelitian yang terimbas konflik sosial beberapa tahun lalu, sehingga pemahaman ini turut menyumbang pada perilaku hidup mereka.

b) Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Berwirausaha

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008. Kabupaten Halmahera Utara (berdiri pada 31 Mei 2003) merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara yang dimekarkan dari Provinsi Maluku pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999. Hal mengenai pembentukan Kabupaten Pulau Morotai dikemukakan di sini dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kabupaten ini masih berusia sangat muda sehingga semua proses pembangunan termasuk proses pembangunan pendidikan pun masih belum tersentuh dengan baik.

Letak Pulau Morotai yang jauh dari ibu kota pemerintahan Maluku di Ambon sebelum Maluku Utara dimekarkan dari Maluku dan Kabupaten Pulau Morotai dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Utara, turut menyumbang bagi tertinggalnya proses pembangunan pendidikan di daerah ini. Salah satu hal penting di sini saat itu adalah sekolah-sekolah formal hanya berada di kota kabupaten, sedangkan di daerah pinggiran hanyalah sekolah yang diprakarsai masyarakat seperti sekolah kristen, itupun hanya pada tingkat pendidikan dasar dan lokasinya di daerah tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa jemaat yang berusia di atas 50 tahun rata-rata hanya mengenyam pendidikan dasar bahkan ada yang tidak bersekolah secara formal. Keterampilan untuk mengembangkan diri dalam dunia usaha pun tidak dimiliki oleh jemaat dikarenakan keterkucilan mereka dari pusat-pusat perekonomian dan pemerintahan. Hal ini pun ditunjang dengan

program-program pengembangan ekonomi pemerintah yang selama ini tidak menjangkau mereka di pelosok pedesaan.

Tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan tersebut mempengaruhi pandangan terhadap konsep kemiskinan seperti telah diuraikan di atas, yang berdampak pada perilaku yang lebih suka menikmati hidup apa adanya dan merasa nyaman dengan pola hidup yang telah dipraktekan secara turun temurun. Mereka merasa nyaman-nyaman saja terhadap situasi kemiskinan, dimana kerja di kebun atau pekerjaan serabutan lainnya dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari sudah cukup memberi kenyamanan hidup.

2) Faktor Eksternal

a) Dampak Konflik dan Pemerataan Bantuan Pemerintah

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi pemikiran dan perilaku jemaat miskin di lokasi penelitian adalah konflik masyarakat yang terjadi di Ambon-Maluku tahun 1999 yang merambat ke Maluku Utara termasuk ke Pulau Morotai. Menurut hasil wawancara dengan beberapa keluarga, ditemukan bahwa mereka dulunya memiliki rumah yang cukup layak dihuni, serta memiliki hewan ternak dan tanaman perkebunan (seperti cengkeh dan pala) yang banyak. Namun saat konflik terjadi, semuanya hilang karena mereka harus mengungsi ke luar dari desa tempat mereka tinggal dan ketika kembali, mereka memerlukan waktu yang lama untuk mengusahakan kembali tanaman dan hewan ternak serta rumah seperti yang dimiliki semula. Bahkan ada beberapa keluarga yang mengaku trauma untuk berusaha dan memiliki kembali hal-hal itu karena takut konflik kembali terjadi.

Hal lain yang ditemui adalah berkaitan dengan bantuan-bantuan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai seperti bantuan listrik masuk desa yang hanya mengutamakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan tidak menjangkau masyarakat kelompok lainnya. Bantuan lain seperti bantuan bibit tanaman jangka panjang juga dikemukakan hanya menjangkau pengurus-pengurus kelompok tani tertentu dan tidak sampai ke masyarakat secara keseluruhan. Hal-hal ini membuat mereka menjadi apatis dan tidak lagi berusaha karena tertutupnya akses menuju sumber-sumber kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.

b) Ketersediaan Sumber Daya Alam

Meyangkut ketersediaan sumber daya alam, yang dimaksud di sini adalah jemaat telah merasa cukup dengan tersedianya lahan bertani/berkebun untuk mereka sebagai keluarga (baik keluarga orang tua maupun anak-anak muda yang baru menikah) demi memenuhi kebutuhan keseharian walaupun jauh dari lokasi desa, sehingga mereka tidak terlalu mempedulikan lagi kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial kemasyarakatan lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Lautan juga menjadi sumber daya yang cukup memanjakan jemaat di sini karena dapat menjadi sumber penghasil ikan dan hasil lainnya setiap saat untuk kebutuhan keseharian mereka. Kegiatan ke kebun maupun ke laut yang dilakukan jemaat ini, merupakan kegiatan harian yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar makan-minum tanpa terorganisir dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan ini menjadi rutinitas yang tidak memperbaiki kualitas hidup keluarga dan jemaat secara umum yang berkaitan dengan keluarnya masyarakat dari garis kemiskinan.

III. Dimanakah Gereja?

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius dan sudah sepantasnya merasa resah melihat agama belum memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Indonesia. Gerakan keagamaan di Indonesia cenderung masih didominasi oleh soal-soal dogmatis-teologis yang eksklusif. Agama pada esensinya hadir untuk manusia, bukan sebaliknya. Manusia yang beragama sudah sepantasnya menjalani dirinya juga sebagai makhluk sosial yang memihak pada kemanusiaan. Beragama seperti itu membuat jemaat menjadi peduli terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ke arah itulah semua agama seharusnya merapatkan barisan dalam rangka membangun bangsa ke arah yang lebih baik.

Gereja sebagai bagian dari agama sudah seharusnya memposisikan diri dengan memihak pada yang lemah. Pemihakan ini bukan untuk membenturkan kaum berpunya dan tak berpunya (pertentangan kelas), tetapi cenderung lebih pada perintah Injil yang amat jelas berbicara tentang panggilan orang Kristen untuk membantu sesama, terutama bagi yang tidak berdaya (Mat. 25:31-46; Luk. 10:25-37). Di Alkitab, terlihat bahwa dasar kritik para nabi terhadap pemerintah adalah seputar kelalaian mereka dalam memberikan perhatian khusus

bagi kaum marjinal (janda, yatim piatu, dan orang asing). Memberi pendampingan dan advokasi bagi yang lemah adalah salah satu alasan gereja di dunia.⁵

Kenyataannya, gereja masih saja berkuat pada persoalan ritual dan pengenapan liturgis namun kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat, yang di dalamnya terdapat kelompok kecil jemaat Kristen. Sehingga institusi gereja kurang respek atau kurang terdorong empati praksisnya dengan kondisi ketimpangan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Gereja seperti kehilangan visi profetis dan praksis sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja seperti “menara gading” yang hanya menjadi media jemaat untuk “bersua” dengan Tuhan pada hari dan tanggal yang diatur, namun tidak bisa berelasi dengan alam realitas yang penuh ketidakadilan dan ketidakbenaran. Padahal, Sidang Raya (SR) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang ke-14 dengan Tema “Berubahlah Oleh Pembaruan Budimu” menegaskan bahwa gereja adalah “Gereja bagi Orang Lain”. Ini menegaskan bahwa gereja seyogianya lebih terbuka, tidak terdorong ke dalam eksklusivisme.⁶

Keprihatinan sosial gereja seharusnya dibangun hingga fungsi sosial gereja dapat mengikutinya. Yewangoe bertanya dalam tulisannya yang berjudul Agama dan Fungsi Transformatifnya: “mengapa keimanan tidak bertindih tepat dengan kemajuan dalam kehidupan sehari-hari?” Ia menjawab, “karena iman kita adalah iman yang berorientasi hanya pada kepentingan diri. Iman yang penuh pamrih pribadi. Alhasil, memang keprihatinan kita kepada persoalan-persoalan sosial bukanlah untuk kepentingan mereka yang kita hadapi, melainkan saya sendiri menginginkan sesuatu sebagai balasan. Dalam perspektif kekristenan, ini yang disebut *credenda* tanpa *agenda*. “Credenda” adalah pengakuan iman, sedangkan “agenda” adalah perbuatan yang ditujukan kepada pihak lain sebagai ungkapan nyata dari pengakuan iman tadi. Kata Yesus Kristus, bukan yang berseru, “Tuhan, Tuhan” itu yang masuk Kerajaan Surga, melainkan yang mengerjakan kehendak bapa-Ku. Apa kehendak Bapa itu? Bukan ibadah yang membosankan, atau pembakaran korban yang memuakkan Allah, melainkan melakukan keadilan dan memperlihatkan kebenaran. Mereka yang miskinlah yang harus mendapat perhatian gereja untuk dilayani”.⁷

⁵ Yonky Karman, “*Diakononia Transformatif Gereja Sebagai Struktur Mediasi*,” CIVIS 02 no. 01, (Pebruari 2010), tanpa halaman. Diakses 20 April 2015. <http://www.leimena.org/id/page/v/211/diakonia-transformatif-gereja-sebagai-struktur-mediati>

⁶ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto Gereja di Dalam Dunia* (Jakarta: Biro Litkom PGI dan BPK Gunung Mulia, 2000), 33-4.

⁷ Andreas A. Yewangoe, *Agama dan Fungsi Transformatifnya (Perspektif Agama Kristen)* dalam *Spiritualitas Agama-Agama Untuk Keadilan dan Perdamaian*, (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2011), 54-5.

Sebagai gereja lokal, Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) beberapa tahun belakangan ini bergelut dengan masalah perpecahan dan konflik intern yang sangat menguras pikiran elemen-elemen gerejanya. Konflik mana telah memecah-belah institusi gereja yang berimbas pada pemecatan pendeta dari status kepegawaian, konflik memperebutkan aset di pengadilan, dan berimbas pula ke dunia pendidikan, serta perkelahian di antara jemaat yang mengakibatkan pembakaran dan pengungsian. GMIH seakan lupa bahwa kehadirannya adalah untuk memberitakan kabar kesukaan Allah, yang berdampak kedamaian bukan sebaliknya saling menyalahkan dan membiarkan jemaatnya kebingungan. Sebagai institusi, GMIH seakan lupa bahwa jemaat-jemaat binaannya sedang terpuruk dengan persoalan ketidakadilan akibat kemiskinan, pelanggaran HAM, HIV/AIDS, tergusur dari hutan-hutan adatnya akibat konsesi tambang dan lain sebagainya. Yang saya contohkan di atas mengenai kemiskinan yang dialami jemaat hanyalah salah satu dari sekian ratus jemaat GMIH, itupun jemaat yang masih dengan mudah dijangkau dari pusat Sinode GMIH di Tobelo. Bagaimana dengan jemaat-jemaat lainn di pulau-pulau yang sulit dijangkau? Tentu suatu asumsi dapat dibangun bahwa mereka jauh lebih sengsara dari yang dikemukakan di atas. Sampai di sini, penulis dengan berani dapat menyatakan bahwa GMIH selama ini telah berdosa karena melakukan ketidakadilan dengan membiarkan jemaatnya dalam kemiskinan. GMIH bersalah karena tidak berusaha membangun kerangka teologi pemberdayaan (ekonomi) guna menjawab tantangan kemiskinan dan globalisasi. Calon-calun sarjana teologi di Sekolah Tinggi Teologi (STT) GMIH (sejak tahun 2008 mejadi Fakultas Teologi Universitas Halmahera) 10 tahun belakangan, menurut pengamatan penulis, cenderung dibekali untuk menjadi pengkhotbah yang etis-dogmatis. Hal ini mungkin saja terjadi karena kurikulum dan pola pendidikan teologi yang dipakai memang hanya menyiapkan sarjana-sarjana teologi “mimbar” yang tugasnya berkhotbah dan berdoa. Padahal belakangan ini, pemerintah lewat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sedang semangatnya mensosialisasikan kurikulum pendidikan tinggi berbasis wirausaha. Mahasiswa bukan hanya diajarkan untuk pintar berteori, tetapi juga terampil dan berjiwa wirausaha. Inilah salah satu tantangan kontekstual GMIH yaitu menjadikan tenaga-tenaga pelayannya bukan hanya pandai berkhotbah, tetapi lebih dari itu menjadikan mereka sebagai pemberdaya ekonomi jemaat lewat kemampuan manajerial yang tangguh dalam mengelola aset dan kekayaan gereja dimana ia melayani.

Tantangan lain yang dihadapi belakangan ini adalah GMIH terkesan tidak menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga yang harus berdiri terdepan sebagai entitas yang mengkritisi dan mendialogkan program-program pemerintah yang menindas, serta pola-

pola dominasi pasar dan pemilik kapital lainnya terhadap jemaat maupun masyarakat secara umum. GMIH seakan telah merasa puas dengan pelayanan-pelayanannya yang terlembaga, tetapi apakah itu cukup? Bukankah sebagai gereja yang diutus melayani, GMIH seharusnya juga keluar dari ruang privat spiritualnya dan masuk ke ruang-ruang publik sehingga secara nyata memperjuangkan kepentingan sosial kemasyarakatan orang-orang lemah yang menjadi jemaatnya? GMIH sebagai kekuatan yang melembaga sudah seharusnya mampu mencegah roda pembangunan agar tidak melindas rakyat, termasuk jemaatnya. Hak-hak kebutuhan dasar individual dari jemaat harus diperjuangkan gereja dari negara. Wawasan eklesiologis GMIH sudah sepantasnya dikembangkan sedemikian rupa dalam menjawab tantangan global yang terus mendesak. GMIH dapat melakukan lebih dari sekedar pelayanan-pelayanan konvensional semata. Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa yang menjadi titik berat pembahasan di sini adalah peran sosial atau soal fungsi sosial gereja khususnya GMIH dalam menjawab persoalan-persoalan jemaat yang berkutat dengan persoalan-persoalan ketidakadilan, termasuk kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Halmahera, secara khusus di “bibir pasifik” Morotai. Pembangunan Indonesia yang mulai diarahkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala ke daerah terluar termasuk Kabupaten Pulau Morotai dalam menjawab tantangan global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dengan demikian harus diantisipasi GMIH jika tidak ingin jemaat-jemaatnya tergerus deras arus pembangunan.

Pertanyaannya sekarang adalah, apa peran sosial-ekonomi yang dapat dilakukan GMIH demi menjawab permasalahan kemiskinan jemaat dan tantangan global yang sudah berada di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat? Bagaimana caranya agar GMIH dapat menjawab ketidakadilan yang dilakukannya selama ini terhadap jemaat dan masyarakat? Dalam tulisan selanjutnya, penulis berusaha menghadirkan dua usulan pemikiran yang kiranya dapat memperkaya pemahaman teologi kontekstual di kalangan GMIH secara khusus dan gereja di Indonesia secara umum. Kedua pemikiran itu adalah penggunaan sumberdaya (baik SDM maupun dana) GMIH dalam dunia bisnis, serta pemikiran Habermas tentang rasionalitas komunikatif yang dapat dipakai GMIH dalam menjalankan fungsi sosialnya menghadapi tantangan dan tekanan negara dan pasar dengan dinamika pembangunan dan globalisasinya.

IV. Praksis Pelayanan GMIH: Usaha Berteologi Kontekstual

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa GMIH patut menjawab ketidakadilan yang dilakukannya selama ini terhadap jemaat dan masyarakat. Hal mana membutuhkan usaha nyata dalam memperbarui pemahaman teologis baik pelayan maupun jemaat, serta mempertanggungjawabkan fungsi sosial profetisnya di kalangan masyarakat luas. Pertanggung-jawaban itu haruslah berbasis keadilan baik bagi jemaat maupun masyarakat dan membutuhkan kerelaan dalam memperkaya pemahaman ortodoksi-nya, serta kerelaan untuk menanggalkan superioritas entitas religiusnya untuk bersama entitas privat lainnya bahu-membahu menopang perjuangan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

A. *Gereja dan Dunia Bisnis: Usaha Menggerakkan Perekonomian Jemaat GMIH*

Membicarakan gereja dan dunia bisnis, seakan membicarakan tentang sesuatu yang religius dan sesuatu yang sekular; soal surgawi dan soal duniawi. Inilah pemahaman yang berakar di kalangan gereja terutama di jemaat-jemaat di pelosok pedesaan. Mungkin saja pemahaman ini berawal dari sikap kekristenan sejak zaman Perjanjian Baru yang tidak menaruh kepedulian serius terhadap dunia bisnis maupun dunia politik. Mereka memahami diri sebagai “ciptaan baru” dari “dunia baru” yang sedang dan akan didatangkan oleh Allah sendiri, dan menganggap dunia yang ada sekarang ini adalah dunia yang kotor, korup, dan akan berakhir pada penghukuman Allah. Sehingga satu-satunya kepedulian mereka adalah bagaimana bertahan, agar di dunia yang kotor dan korup ini mereka tetap bersih. Cukuplah jika mereka bekerja dengan tekun, rajin dan jujur untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (bnd. 2 Tes 3:6-12; Kol.3:22-25; Ef.6:5-9).⁸

Dunia baru yang “bersih” itu kemudian menafikkan dunia bisnis sebagai sesuatu yang kotor, padahal dunia bisnis (termasuk bisnis online dengan segala kemudahannya) dewasa ini sangat menjanjikan prospeknya. Tidak sedikit orang berkecimpung dan terlibat dalam dunia bisnis. Mulai dari yang berskala mikro sampai makro, dari yang legal sampai yang ilegal, dari pelaku bisnis perorangan sampai kelompok. Banyak orang serta kelompok yang terlibat di dalam dunia bisnis oleh karena dunia tersebut benar-benar menyediakan ruang yang sangat luas untuk berkarya, mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, tak jarang dunia bisnis diidentikan dengan suatu keadaan yang penuh dengan kecurangan, yang di dalamnya terdapat berbagai praktek ketidakadilan, penyelewengan, penipuan dan lain

⁸ Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan Penatalayanan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 2.

sebagainya.⁹ Pendapat ini ada benarnya juga jika ditinjau dari segi visi bisnis yang semata-mata mengejar laba besar tanpa peduli dengan lingkungan, yang mengeksploitasi tenaga manusia tanpa memperhatikan kesehatan, yang memakai dan menghalalkan segala cara termasuk KKN, yang menjual barang dengan kualitas rendah, yang dengan segala cara mematikan usaha orang lain yang mungkin menjadi kompetitor dan lain sebagainya.¹⁰ Hal mana secara langsung mempengaruhi opini publik tentang dunia bisnis itu sendiri termasuk pelaku-pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya sebagai dunia dan orang-orang yang perlu dijauhi, perlu dihindari bahkan dicap tabu dan sangat negatif. Tak jarang orang Kristen bahkan lembaga gereja mengambil sikap yang demikian pula. Apabila ada upaya pengembangan ekonomi jemaat dalam hubungan dengan bisnis, serentak dianggap sebagai sesuatu yang negatif.

Keadaan ini semakin bertambah parah oleh karena bisnis terkadang dilihat dalam sisi yang lain yaitu semata-mata soal duniawi. Buktinya, jarang sekali kita mendengar percakapan bisnis yang terkait dengan soal iman. Apakah ini pertanda bisnis tidak terkait dengan soal iman?¹¹ Atau mungkinkah pandangan antara agama dan ekonomi masih terbatas pada teori isolasi yang melihat agama dan ekonomi sebagai dua ruangan yang terpisah dan terisolasi serta bekerja menurut mekanismenya masing-masing atau teori konfrontasi yang di dalamnya terjadi pertentangan antara agama dan ekonomi dan keduanya diyakini tidak bisa *co-exist* tanpa terjadi saling membantai atau berperang, dan belum menanjak pada teori kolusi yang melihat adanya hubungan yang kolusif antara agama dan ekonomi?¹² Sementara pada sisi lain pelaku bisnis dalam kipranya akan berhadapan terus-menerus dengan berbagai keputusan yang berdimensi etis dan moral, mulai dari menentukan bisnis apa yang akan dilaksanakan; apakah boleh berbisnis dalam bidang yang ada kaitannya dengan judi? Yang ada hubungannya dengan komersialisasi yang terang-terangan berdampak negatif terhadap kesehatan dan eksploitasi wanita? Bagaimana menetapkan sasaran keuntungan, harga dan lain-lain. Berapakah keuntungan yang wajar? Bagaimana memenangkan tender? Bagaimana mengatur pembukuan dan pembayaran pajak? Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa seluruh proses bisnis sarat dengan dimensi etika dan moral yang sangat terkait pula dengan

⁹ Alexander Hill, *Etika Bisnis Kristiani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 1.

¹⁰ Jonathan Parapak, "Iman Kristen dan Peranannya dalam Usaha Bisnis," dalam *Bergumul dalam Pengharapan*, ed. Ferdi Suleman, dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 318.

¹¹ Parapak, "Iman Kristen dan Peranannya dalam Usaha Bisnis," 317.

¹² Eka Darmaputera, "Altar dan Pasar: Struktur Relasi Agama dan Ekonomi," dalam *Gereja dan Kontekstualisasi*, ed. Solarso Sopater, dkk. (Jakarta: PSH, 1999), 130-46.

persoalan iman.¹³ Dengan demikian tak dapat dihindari bahwa pembicaraan tentang bisnis dan iman Kristen merupakan tugas penting dan menarik untuk distudikan dari saat ke saat.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah pandangan negatif terhadap dunia bisnis turut mempengaruhi warga jemaat kristen yang bernaung di bawah Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), sehingga cenderung tidak memakai uang (dana) gereja untuk berbisnis? Berdasarkan penelitian penulis, banyak gereja yang bernaung di bawah GMIH tidak pernah terjun dalam dunia bisnis sehingga dana yang digalang gereja jarang bahkan tidak pernah dipakai gereja untuk berbisnis. Padahal sumber daya manusia gereja sangat mendukung untuk melakukan kegiatan bisnis ini. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat ironis karena ketika gereja berbicara tentang pemberdayaan ekonomi jemaat, ternyata bahwa gereja sebagai lembaga tidak pernah merogoh sakunya untuk berkarya dan mengkaryakan anggotanya dalam dunia bisnis. Padahal gereja memiliki kemampuan sumberdaya dan dana untuk berkecimpung dalam dunia tersebut. Mengingat pemberdayaan ekonomi jemaat merupakan suatu hal yang sementara hangat dibicarakan, baik di tingkat sinode maupun di tingkat jemaat maka sudah sepantasnya jika salah satu agenda penting yaitu bisnis harus dilakoni gereja. Namun kenyataan yang terjadi justru hal ini hanya menjadi semacam wacana tanpa tindakan nyata dari pihak gereja sebagai lembaga.

Penulis bersama dengan salah seorang dosen Program Studi Manajemen Universitas Halmahera (Lomas Beatris Limpong, M.Si) pernah meneliti mengenai hal ini dan menemukan bahwa pada dasarnya kenyataan yang terjadi pada jemaat GMIH, dimana pandangan atau wawasan berpikir jemaat cenderung sangat negatif terhadap dunia bisnis, mempengaruhi tindakan mereka yang tidak mau mempergunakan dana dan sumberdaya manusia gereja secara khusus untuk dipergunakan dalam dunia bisnis. Hal ini tentu saja bermasalah jika ditelusuri, dimana keuangan gereja yang begitu kuat hanya terpendam dalam perbendaharaan gereja, padahal di kalangan jemaat membutuhkan topangan dana untuk kegiatan-kegiatan wirausaha.¹⁴ Hal ini tentu saja membutuhkan perubahan paradigma berpikir di kalangan para pemimpin jemaat yang akan berdampak pada perubahan paradigma di kalangan jemaat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa pendeta dan penatua jemaat, ditemukan bahwa pandangan ini sudah berakar lama di dalam jemaat sehingga mereka hanya mengikuti apa yang dikehendaki jemaat tanpa berusaha

¹³ Parapak, *"Iman Kristen dan Peranannya dalam Usaha Bisnis,"* 319.

¹⁴ Lebih jauh mengenai hasil penelitian ini tertuang dalam Laporan Penelitian Dosen Pemula (PDP) DIKTI Tahun 2013, dengan judul: *Pandangan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Wilayah Pelayanan Tobelo Terhadap Dunia Bisnis*, dan pernah dipublikasi pada Jurnal UNIERA Volume 3 Nomor 1, (Februari 2014), 51-60 dengan judul yang sama.

mengkritisinya. Ketika ditanya tentang sumber pandangan tersebut, para pendeta dan penatua jemaat hanya menitikberatkan pada tradisi yang telah diikuti sejak dahulu tanpa ada pemahaman teologis yang mendalam. Gereja sebagai utusan Allah di dunia sudah sepantasnya berkecimpung dalam setiap bidang kehidupan, termasuk ekonomika dan bisnis. Kegiatan bisnis harus direfleksikan gereja sebagai bagian yang harus dimasuki gereja tanpa memandangnya sebagai sesuatu yang kotor, yang tidak perlu disentuh, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari pola pelayanan dan pengembangan gereja yang dapat memberdayakan dan mensejahterahkan jemaat di dalamnya.

Bisnis sepantasnya dipandang gereja sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pengembangan dan pemberdayaan jemaat, sehingga sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan gereja dapat dimanfaatkan demi tercapainya kesejahteraan jemaat. Selama ini yang terjadi di Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) adalah kegiatan bisnis dengan menggunakan sumberdaya gereja dianggap sebagai sesuatu yang ‘kotor’ sehingga cenderung dijauihi, bahkan tidak pernah masuk dalam agenda-agenda persidangan, baik persidangan di tingkat jemaat, maupun ditingkat sinodal. Padahal, jika ditelusuri, GMIH adalah gereja yang bertolak dari ajaran calvinis yang justru menyetujui penggunaan sumberdaya keuangan gereja demi menolong orang miskin, atau demi pengembangan ekonomi masyarakat.

Sumberdaya keuangan gereja sudah sepantasnya digunakan untuk mendatangkan kesejahteraan. Tetapi sumberdaya keuangan gereja ini haruslah dikelola secara profesional dengan mengedepankan aspek pelayanan bagi orang miskin dan pelaku usaha yang membutuhkan bantuan atau sokongan dana demi mengembangkan usaha atau produksi yang nantinya bermuara pada menguatnya ekonomi jemaat. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa sumberdaya keuangan gereja bukanlah sesuatu yang ‘kudus’ yang harus dijaga untuk beredar di kalangan ‘terbatas’ atau kalangan ‘sendiri’, tetapi sepantasnya dipakai untuk menunjang kegiatan produksi jemaat demi penguatan pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan.

Jikalau pun ada kelemahan dalam hal sumberdaya keuangan yang dimiliki jemaat-jemaat GMIH tertentu dalam situasi dan tantangan global saat ini, sudah sepantasnya jika dicari alternatif-alternatif lainnya semisal berkawan atau berjejaring (bukan menghambakan diri) dengan berbagai elemen (salah satunya Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa). Hal ini diperlukan dalam membangun sinergi demi mengayomi program-program Pemerintah yang mengucurkan banyak sekali dana ke desa-desa. Bukankah gereja adalah bagian dari masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab membangun negeri? Sudah sepantasnya jika

program-program gereja (termasuk bisnis) ikut disinergikan dengan program-program di desa-desa. Jaman ini adalah jaman modern, sudah tidak lazim jika gereja terus mengurung diri dalam citra kudusnya dan menolak setiap perubahan yang hadir di depan mata.

B. Fungsi Sosial GMIH Berbasis Konsep Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas

Berbagai persoalan yang dihadapi Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) belakangan ini memerlukan refleksi secara terus menerus terhadap semua elemen bergereja, baik ajarannya maupun pelaksana pelayanannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat termasuk di dalamnya persoalan bergereja di tengah masyarakat. Sudah seharusnya gereja mulai menjadi agen transformasi sosial yang menyuarakan tentang ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Gereja sudah sepatutnya melakukan intervensi ke dalam masalah-masalah sosial, dan selanjutnya dapat melibatkan diri secara aktif dan total dalam usaha mewujudkan transformasi sosial.¹⁵ Gereja perlu memikirkan kembali pandangannya tentang teologi sosial yang selama ini diajarkan dan dihidupinya. Pemikiran kembali ini diharapkan akan memberikan pencerahan yang diperlukan bagi terciptanya sebuah teologi yang seimbang. Sebuah teologi yang akan mengajar jemaat untuk mengasihi Tuhan dan juga sesamanya. Pada tataran faktual, nampaknya seringkali gereja bereaksi cepat dan menyatakan protes keras ketika ada pelecehan terhadap gereja, baik dalam wujud teror, penghancuran dan penutupan gedung gereja. Segala upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan “Rumah Tuhan” itu. Hal ini tentu saja wajar untuk dilakukan. Tetapi, mengapa gereja tidak bereaksi secepat dan sekeras itu ketika hak-hak warga negara ditindas sedemikian rupa oleh penguasa? Mengapa gereja cenderung bungkam seribu bahasa, ketika hak-hak asasi manusia ditekan oleh penguasa? Mengapa gereja cenderung diam di tengah kemiskinan yang dialami sebagian besar jemaatnya?

Gereja seharusnya menghadirkan diri sebagai komunitas eksemplaris (komunitas percontohan), yaitu sebagai suatu gerakan moral bagi keadilan, kebenaran, dan kebebasan dalam keberpihakannya bersama rakyat kecil. Integritas moral dan spiritual gereja harus nampak dalam kehadirannya bersama semua komponen bangsa ini. Gereja harus dibebaskan dari kehadirannya yang menyerupai jawatan, dan mulai dengan sigap, peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakatnya. Lebih berorientasi pada yang fungsional, bukan

¹⁵ Harvie M. Conn, *Christian Social Ministry: What's the Problem?*, *Urban Mission Journal*, 14, no.1, (September 1996), 17.

formalistik. Gereja tidak lagi hadir sebagai kekuatan yang eksklusif dan ekspansif, melainkan inklusif, inspiratif, komunikatif dan rekonsiliatif.¹⁶ Gereja seharusnya meninggalkan pandangan yang menganggap diri *perfect*, sempurna, yang harus selalu menjadi contoh atau teladan bagi komunitas lain di sekitarnya. Gereja dalam hal ini harus merekonstruksi cara berpikir lama yang menganggap diri sempurna kepada cara berpikir baru yang mengedepankan komunikasi antar manusia sebagai sesama subjek dalam membangun tindakan bersama.

Mencermati beberapa hal yang dipaparkan sebelumnya, maka perlu dipertimbangkan alternatif-alternatif jawaban gereja terhadap permasalahan ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kemiskinan di masyarakat. Menjawab tantangan ini, maka konsep rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas mendapatkan tempatnya yang cocok di dalam pluralitas dan kompleksitas masyarakat modern. Rasionalitas Komunikatif adalah tindakan berdasarkan proses musyawarah, di mana dua atau lebih individu berinteraksi dan mengkoordinasikan tindakan mereka berdasarkan interpretasi dan kesepakatan terhadap situasi.¹⁷ Dalam konteks modern, menurut Habermas, masyarakat ini diandaikan sebagai masyarakat yang komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, melainkan lewat argumentasi, yaitu perbincangan atau diskursus dan kritik. Karena itu, Habermas mengusahakan dasar-dasar kerjasama sosial bagi masyarakat pluralistik modern. Perhatian Habermas adalah bagaimana bisa dicapai konsensus rasional bila terjadi konflik dalam masyarakat pluralistik modern. Menurut Habermas, kehidupan masyarakat modern menyimpan banyak konflik sosial, hukum, ekonomi, lingkungan dan budaya, sehingga diperlukan suatu penyelesaian dalam mengatasi problem modernitas dengan sebuah tindakan yang lebih komunikatif. Dari sinilah pandangan Habermas tentang tindakan komunikatif yang berfungsi untuk mengirim dan memperbarui pengetahuan dalam proses mencapai pemahaman bersama serta dalam rangka membentuk identitas bisa tercapai.¹⁸

Membicarakan gereja dalam pandangan Habermas merupakan suatu kesulitan tersendiri, karena ia memang tidak secara langsung mengembangkan teorinya untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di ranah agama atau secara khusus di dalam

¹⁶ Reinal Robert, "Menjadi Gereja yang Fungsional," INTIM, No.6 (Semester Genap, 2004), 50. <http://www.oaseonline.org/artikel/reinal-eka.pdf>

¹⁷Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume I: Reason and the Rationalization of Society*, (Boston: Beacon Press, 1984), 86.

¹⁸ Habermas, *The Theory of Communicative Action*, 140.

gereja. Tetapi adalah baik untuk merelevansikan teorinya dalam kerangka menghadirkan solusi bagi persoalan-persoalan di dalam masyarakat termasuk gereja. Gereja pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat secara umum. Berkaitan dengan hal itu, maka gereja sudah sudah sepantasnya memperjuangkan kemakmuran masyarakat. Tujuan menghadirkan konsep rasionalitas komunikatif Habermas di sini tentunya untuk melengkapi gereja, termasuk GMIH di dalamnya untuk lebih peka memperjuangkan keadilan bagi jemaatnya yang terpuruk dengan masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan sebagainya akibat lajunya proses pembangunan yang melibatkan pemilik kapital yang terkadang ditopang oleh negara dan elemen-elemennya.

Eka Darmaputera mengemukakan bahwa ada yang harus berubah dan terus berubah, tetapi ada pula yang tidak pernah boleh berubah yaitu hakikat dan misi sebagai gereja. Di dalam pernyataan ini, ada yang harus ditekankan bahwa Darmaputera berbeda secara fundamental dengan beberapa aliran dalam gereja yang sangat menekankan pada aspek “pertumbuhan gereja” yang memberi kesan yang kuat bahwa gereja harus melaksanakan misinya agar supaya bertumbuh (baca: bertambah). Seolah-olah pertumbuhan (pertambahan) gereja itulah yang menjadi tujuan.¹⁹ Darmaputera, dalam hal ini dapat dikatakan hampir sejalan dengan Habermas yang tidak melihat pertumbuhan (pertambahan) keanggotaan gereja sebagai tujuan tetapi lebih mengutamakan proses menggereja sebagai tujuan. Jika gereja menjadikan pertumbuhan (pertambahan) sebagai tujuan, maka pada aras ini gereja bisa disamakan dengan paradigma sosial yang dikembangkan Marx, seperti yang dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Bentuk Paradigma Sosial Gereja & Habermas

	Paradigma	Pelaku	Aksi	Tujuan
Gereja	Misi	Warga gereja	Pekabaran Injil	Pertumbuhan (pertambahan) anggota gereja
Habermas	Komunikatif	Rasio Manusia	Perbincangan Rasional	Dialog Argumentatif

Jika gereja mengembangkan paradigma misi, maka semua sumberdaya gereja akan dikerahkan untuk menopang misi tersebut. Setiap aksi dan pelayanan sosial yang dilakukan warga gereja akan terselip di dalamnya usaha-usaha pekabaran Injil untuk mencapai tujuan

¹⁹ Eka Darmaputera, “Gereja dan Masalah Politik Kita Saat Ini”, dalam *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks – Teks Terpilih Eka Darmaputera*, ed. Martin L. Sinaga, dkk., (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 460.

pertumbuhan (pertambahan) anggota gereja. Gereja dalam hal ini dapat dikatakan menganut paham pembebasan masyarakat dari berbagai persoalan hanya dengan menjadikannya sebagai bagian dari keanggotaan gereja tanpa mendalami hal-hal prinsip sebenarnya yang dihadapi masyarakat. Hal ini akan mirip dengan apa yang dilakukan Marx, yang mengembangkan paradigma kerja untuk memperjuangkan penghapusan kelas pada masyarakat di zamannya lewat revolusi penaklukan kelas atas kelas. Gereja yang berparadigma misi akan terjebak pada praksis kerja sebagai wujud aktualisasi diri, dengan mengerahkan kemampuan-kemampuan kreatifnya hanya untuk memproduksi anggota-anggota baru bagi komunitasnya, yang dengan sendirinya akan mengisolasi gereja dari dunia objektif di luar gereja. Gereja dalam hal ini akan terkesan sebagai kekuatan penakluk yang sangat subjektif. Apakah hal yang dilakukan gereja ini mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi gereja maupun masyarakat? Tentu saja tidak menurut Habermas.

Menurut Habermas, gereja seharusnya memakai paradigma komunikatif sebagai acuan untuk bertindak dalam dunia kehidupan. Komunikasi secara sederhana menggambarkan kesadaran gereja mengenai apa yang ada di dalam pikirannya untuk disampaikan kepada pihak lain. Di saat mengedepankan komunikasi, gereja akan mengedepankan rasio manusia untuk mencapai pemahaman bersama. Berdasarkan paradigma komunikatif, bentuk pekabaran Injil dalam terminologi gereja diganti dengan perbincangan rasional dengan tujuan menciptakan masyarakat yang demokratis dan emansipatoris tanpa adanya desakan, paksaan, maupun dominasi dari pihak-pihak tertentu. Berdasarkan hal ini, maka pertumbuhan (pertambahan) anggota sebagaimana yang menjadi tujuan gereja di atas akan tergantikan dengan dialog argumentatif antara berbagai pihak termasuk gereja, dengan menggunakan rasio demi terciptanya tujuan bersama.²⁰

Gereja dengan demikian harus memiliki “kompetensi komunikasi” guna menjalankan tindakan komunikatif demi tercapainya tujuan bersama seperti dikemukakan di atas. Berdasarkan teori tindakan komunikasi Habermas, partisipan menjalankan rencananya secara kooperatif berdasarkan definisi situasi bersama. Lebih jauh mengenai hal ini dikemukakan Hardiman, dalam tindakan komunikatif terlihat bahwa para partisipan membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebut Habermas “klaim-klaim kesahihan” (*validity claim*). Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus. Kalau kita sepakat tentang dunia

²⁰ Bnd. Yadi Supriyadi, “Jurnalisme dalam Pandangan Ontologi Ruang Publik Jürgen Habermas” (M.Phil tesis., Fakultas Filsafat UGM, 2010), 42-3.

alamiah dan objektif, kita mencapai “klaim kebenaran” (*truth*). Kalau sepakat tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, kita mencapai “klaim ketepatan (*righthness*). Kalau sepakat tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, kita mencapai “klaim autentisitas” atau “kejujuran” (*sincerity*). Akhirnya, kalau kita bisa menjelaskan macam-macam klaim itu dan mencapai kesepakatan atasnya, kita mencapai “klaim komprehensibilitas” (*comprehensibility*). Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai klaim yang keempat ini, dan orang yang mampu berkomunikasi dalam arti menghasilkan klaim-klaim itu, disebutnya memiliki “kompetensi komunikasi”.²¹

Gereja Menurut Habermas

Menurut pandangan Habermas di sini, gereja yang dimaksud bukanlah dalam pengertian Alkitabiah sebagai “Umat Allah”, atau “Tubuh Kristus” atau “Bait Roh Kudus”, juga bukan pula dalam arti “orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan”, tetapi melampaui semua itu sebagai orang-orang yang seharusnya memiliki kemampuan komunikatif yang telah diuraikannya, sehingga secara kooperatif menjalankan fungsi komunikatifnya dengan baik. Gereja dalam hal ini sudah sepantasnya memiliki apa yang disebut Habermas sebagai “kompetensi komunikasi” sehingga mampu memberikan argumentasi-argumentasi dalam diskursus untuk menciptakan suatu masyarakat yang komunikatif. Gereja adalah bagian dari masyarakat yang ikut menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik lewat diskursus komunikatif dengan mengandalkan rasionalitas komunikatif untuk mencapai kesaling-pengertian atau konsensus demi terciptanya tatanan masyarakat yang komunikatif.

²¹ Budi F. Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 18.

Secara sosiologis, gereja tidak akan mungkin dikatakan terpisah dari masyarakat. Hal ini dikatakan dengan melihat bahwa anggota gereja adalah juga bagian dari keanggotaan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat tentu saja gereja akan turut memberikan andil bagi perkembangan masyarakat, salah satunya memperjuangkan atau menyuarakan kepentingan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang tertindas, miskin, tersisih, serta dilanggar hak-hak asasinya. Gereja sebagai bagian dari masyarakat tentu akan terlibat dalam berbagai usaha untuk menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat dengan pemerintah sebagai bagian dari kekuasaan, dan “pasar” di dalam sebuah “ruang” yang sering disebut ruang publik.

Demi mencegah agar gereja tidak terlibat langsung dengan politik dan kekuasaan, maka sepantasnya jika gereja bergerak lewat jalur masyarakat sipil dan melihat isu-isu sehari-hari yang berkembang dalam masyarakat serta berusaha untuk membawanya dalam sebuah komunikasi publik. Komunikasi publik ini sudah seharusnya terjadi dalam ruang publik yang bebas dari dominasi kekuasaan tertentu, sebagaimana yang dicita-citakan Habermas, sehingga pemikiran-pemikiran dan argumentasi-argumentasi yang menyertainya dapat dikeluarkan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Adapun diskursus yang terjadi dalam ruang publik ini, yang berlaku hanyalah argumentasi yang berdasarkan akal budi, yang dapat dimengerti semua pihak atau dengan kata lain argumentasi-argumentasi yang disampaikan semua bercorak sekular. Gereja dengan demikian tidak diperkenankan berbahasa secara religius dalam diskursus di ruang publik ini, tetapi melegitimasi argumentasinya secara sekular dalam argumentasi masyarakat secara umum.

Berdasarkan hal ini, maka gereja dapat dikatakan melepaskan ke-religiusitas-nya dan mengedepankan nilai-nilai etis-moral-kemanusiaan yang ada di dalamnya sehingga menjadi sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan masyarakat. Gereja dituntut untuk melepaskan klaim sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk menafsirkan dan atau menentukan kebenaran dan cara hidup, karena gereja sekarang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang sekular.

V. Penutup

“Agama bisa membawa perdamaian apabila pengikutnya melampaui ketaatan kelembagaannya dan melebur di tingkat iman dan pengalaman tentang Tuhan sebagai awal, sumber dan tujuan umat manusia. Agama masa depan harus bernapaskan perikemanusiaan atau ia tidak akan *survive*. Agama hanya mempunyai masa depan apabila ia dapat memancarkan kebaikan, belaskasihan dan kebesaran hati Ilahi secara meyakinkan ke dalam masyarakat. Agama harus secara meyakinkan menunjukkan diri sebagai kekuatan perikemanusiaan.”²²

Gereja (termasuk GMIH) sebagai bagian dari agama, dengan demikian diutus untuk menjadi alat yang memperjuangkan masalah-masalah kemanusiaan, baik yang terjadi di kalangan internal maupun secara umum di masyarakat. Kemiskinan jemaat, tantangan fungsi sosial komunikatif yang dikemukakan demi sedikit memberi masukan kepada gereja demi langkah-langkah perjuangan yang semakin kompleks ke depan. Harapannya, gereja semakin dewasa dalam melihat masalah-masalah kemanusiaan dan nilai-nilai perikemanusiaan yang harus terus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan bagi gereja maupun masyarakat. Kritik-kritik yang dikemukakan janganlah dipandang sebagai pisau yang melukai, tetapi ada baiknya dipandang sebagai alat di tangan tukang periuk yang memperindah hasil karya yang dapat dinikmati dengan sukacita. Jika kritik dan masukan ini dapat diterima, maka gereja niscaya akan menjadi kekuatan perikemanusiaan yang sudah benar berjalan di jalan keadilan.

Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Maluku Utara, *Maluku Utara Dalam Angka 2016*, diakses 10 Agustus 2016.
http://malut.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Provinsi-Maluku-Utara-Dalam-Angka-2016.pdf
- Conn, Harvie M. *Christian Social Ministry: What's the Problem?*, Urban Mission Journal, 14/1, September 1996.
- Djurubasa Arkipus dan Nanuru, Ricardo F, *Pemetaan dan Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan pada Jemaat-Jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) di Kabupaten Pulau Morotai* (Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing DIKTI), Tobelo: LPPM Universitas Halmahera, 2015.
- Eka, Darmaputera. *Altar dan Pasar, Struktur Relasi Agama dan Ekonomi*, dalam *Gereja dan Kontekstualisasi*, ed. Solarso Sopater, dkk., Jakarta: PSH, 1999.

²² Kutipan ini diangkat dari sampul belakang buku *Spiritualitas Agama-Agama untuk Keadilan dan Perdamaian*, ed. Indro Suprobo (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2011).

-, *Gereja dan Masalah Politik Kita Saat Ini*, dalam *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks – Teks Terpilih Eka Darmaputera*, ed. Martin L. Sinaga, dkk., Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.
-, *Etika Sederhana Untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan Penatalayanan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action, Volume I: Reason and the Rationalization of Society*, Boston: Beacon Press, 1984.
- Hardiman, Budi F. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hill, Alexander. *Etika Bisnis Kristiani*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Karman Yonky, *Diakononia Transformatif Gereja Sebagai Struktur Mediasi*, CIVIS 02 no. 01, (Pebruari 2010), tanpa halaman. Diakses 20 April 2015. <http://www.leimena.org/id/page/v/211/diakonia-transformatif-gereja-sebagai-struktur-mediasi>.
- Nanuru, Ricardo F dan Limpong Beatris Lomas, *Pandangan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Wilayah Pelayanan Tobelo Terhadap Dunia Bisnis*, Jurnal UNIERA, 3 no 1, Februari 2014.
- Parapak, Jonathan. *Iman Kristen dan Peranannya dalam Usaha Bisnis*, dalam *Bergumul dalam Pengharapan*, ed. Ferdi Suleman, dkk., Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Pattinama, Marcus J, “*Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru – Maluku dan Surade – Jawa Barat)*,” Makara, Sosial Humaniora 13, no. 1 (Juli 2009): 1-12, diakses 20 April, 2015, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/e98e701d3488e758e71344d4c5a109bd7770dbd0.pdf>
- Robert Reinal, “*Menjadi Gereja yang Fungsional*,” INTIM, No.6 (Semester Genap, 2004), 46-55. Diakses 20 April 2015 <http://www.oaseonline.org/artikel/reinal-eka.pdf>
- Supriyadi Yadi, *Jurnalisme dalam Pandangan Ontologi Ruang Publik Jürgen Habermas*. M.Phil Tesis, Fakultas Filsafat UGM, 2010.
- Taufiq, Ahmad, dkk., “*Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)*,” POLITIKA, 1 no. 1, (April 2010), 75-88, diakses 20 April 2015. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHiMHAqdTPAhXCKY8KHetQB6YQFggcM&url=http%3A%2F%2Fjournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fpolitika%2Farticle%2Fdownload%2F156%2F102&usg=AFQjCNH7yswXXI-AOBzPTaEy8JG-ol9Q5g>
- Yewangoe, Andreas A. *Tidak Ada Ghetto Gereja di Dalam Dunia*, Jakarta: Biro Litkom PGI dan BPK Gunung Mulia, 2009.
-, *Agama dan Fungsi Transformatifnya (Perspektif Agama Kristen)* dalam *Spiritualitas Agama-Agama Untuk Keadilan dan Perdamaian*, Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2011.

BIODATA PENULIS

Ricardo Freedom Nanuru, lahir dari pasangan: ayah yang tidak lulus SMP (Frederik F. Nanuru) dan ibu guru SD (Salomi Soplantila {almarhumah}) di Eri – Ambon pada tanggal 07 Juni 1979. Memiliki seorang istri (Corlina Cherrel Patty) dan 2 putra/i (Felixiano Freedjhon dan Felicia Cataleya). Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Eri pada tahun 1992, pendidikan menengah di SMP Negeri 5 Latuhalat pada tahun 1995, dan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 2 Ambon pada tahun 1998. Menyelesaikan Sarjana Sains (S.Si) di bidang teologia tahun 2003 di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) – Ambon. Setelah itu mengikuti pendidikan Akta Mengajar IV di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura – Ambon, dan menamatkannya pada tahun 2004. Pendidikan Magister of Philosophy (M.Phil.) diselesaikan pada tahun 2011 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), dan sedang melanjutkan program doktoral di fakultas yang sama sejak tahun 2014.

Sejak Januari 2005 sampai sekarang bertugas sebagai tenaga pengajar tetap dpk di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Masehi Injili di Halmahera (STT GMIH), yang sekarang berubah menjadi Fakultas Teologi karena pengembangan STT menjadi Universitas Halmahera di tahun 2008. Selain tulisan ini, penulis penulis juga aktif menulis di Buletin Sangkakala, Tabloid Percis Halmahera, Jurnal Wisdom Fakultas Filsafat UGM dan Jurnal Lintas Ilmu UNIERA, serta beberapa tulisan pada kumpulan buku penghargaan tokoh.